

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2004

■ Minyak Dunia

Maret 2004, Harga Minyak Mentah  
Dunia Diperkirakan Turun

Jakarta, NERACA

Harga minyak mentah dunia dipasar internasional diperkirakan akan turun pada Maret 2004 sejalan dengan turunnya permintaan. "Ada perkiraan harga minyak mentah pada bulan depan akan turun," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro yang juga merupakan Presiden Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), kepada wartawan, di Jakarta, kemarin

OPEC sendiri sebelumnya juga telah berencana untuk memotong produksinya sebanyak 1 juta barel per hari (bph) pada April 2004 dari 24,5 juta saat ini menjadi 23,5 juta bph di luar produksi Iraka gar harga minyak berada di kisaran US\$ 22- US\$ 28 per barel. "OPEC sendiri tetapkan berpegang pada keputusan Februari lalu, yaitu memotong produksinya 1 juta barel per hari per 1 April 2004. Intinya, OPEC tetap akan menstabilisasi harga," kata Purnomo.

Sedangkan mengenai harga yang saat ini masih jauh di atas US\$ 28 per barel atau berkisar US\$ 30-US\$ 31 per barel, ia menilai, secara berturut-turut selama dua minggu, OPEC bisa saja melebihi

produksinya. "Ini dimungkinkan karena keberadaan OPEC sebagai stabilisasi harga," katanya.

Menurut Purnomo, masih tingginya harga pada saat ini disebabkan oleh faktor fundamental dan non fundamental. Faktor fundamental adalah kebutuhan pasar tinggi sejalan dengan musim dingin di banyak negara masih terus berlanjut sehingga kebutuhan akan minyak terus menguat.

Sedangkan faktor non fundamental, yaitu belum membaiknya situasi di Irak sehingga suplai minyak yang diharapkan dalam mendukung pasok di pasar masih belum berjalan sesuai diharapkan. "Dengan demikian, target produksi minyak Irak mencapai tiga juta barel per hari belum diketahui kapan bisa dicapai," ujarnya.

Di sisi lain, faktor psikologis dengan adanya rencana OPEC yang akan memotong produksinya sebesar satu juta barel per hari pada April juga menimbulkan kekhawatiran para pedagang minyak.

"Rencana pemotongan produksi ini mendapat reaksi dari pasar dan menimbulkan efek psikologis bagi para trader yang khawatir akan mengganggu arus pasok minyak di pasar internasional." (22)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN <b>FEB</b> MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    17 18 19 20 21 22 23 24 <b>25</b> 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 11 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

## Selama Ada Perbedaan Harga, Penyelundupan Jalan Terus



**A**GAR tidak dijuluki sebagai macan ompong, Menteri Energi Purnomo Yusgiantoro meminta agar Tim terpadu menindak para pelaku pengoplosan dan penyelundupan BBM. Tim pimpinan Slamet Singgih tidak bisa melimpahkan 'kemacetan' pengusutan kasus BBM tersebut ke kepolisian. Sementara Timdu sendiri hanya berpangku tangan tanpa bertindak pro aktif.

"Sebenarnya di Undang-Undang, sanksi terhadap pelaku ada dan keras. Tapi yang namanya pengoplosan dan pemakai industri di luar BBM subsidi (minyak tanah, red) ini kan melihat untung ruginya. Kalau risiko kecil dan ongkosnya kecil, mereka akan melakukan," kata Purnomo usai memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Keamanan (Rakorkam) II Kesiapan PLN menghadapi Pemilu 2004 di Jakarta, kemarin.

Bahkan, dinyatakan, dari dulu Pemerintah sudah mewaspadaai penyelundupan BBM, tapi kenyatannya tetap terjadi di lapangan. Maraknya kelangkaan minyak tanah, disinyalir karena banyak tindak pengoplosan yang

diakibatkan disparitas (perbedaan) harga antara minyak tanah rumah tangga dan industri. Sehingga, membuka kesempatan bagi penyelundup.

Selain masalah disparitas, kelangkaan minyak tanah juga dipicu pembatasan volume minyak tanah yang disalurkan sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR. Untuk tahun ini ditargetkan 61 juta kilo liter. Pembatasan itu terkait subsidi BBM di anggaran 2004 yang besarnya sekitar Rp 15 triliun.

"Artinya volume dibatasi dan harganya juga sudah ditentukan. Kalau volumenya nambah, otomatis subsidiya juga nambah. Jadi kini, sejauh mana pemerintah dan Pertamina mengikuti volume yang dialokasikan dalam APBN," ujar bekas staf ahli Mentamben IB Sudjana (alm) ini.

Menghadapi kondisi kelangkaan minyak tanah, dia menyarankan dilakukan Operasi Pasar (OP). Namun operasi itu sendiri harus hati-hati. Apakah memang benar terjadi kelangkaan atau ada oknum yang sengaja ingin mendapatkan volume lebih agar timbul kelangkaan. (MAF)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 1	
TAHUN 2004	

## Distribusi Minyak Tanah Diupayakan Sesuai Alokasi APBN 2004

Jakarta, NERACA

Distribusi minyak tanah di dalam negeri diupayakan tetap mengikuti volume yang telah dialokasikan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2004 sekitar 11,5 juta kilo liter.

"Distribusi minyak tanah sebisa mungkin tetap diupayakan mengikuti alokasi yang diputuskan dalam APBN," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan, di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, keresahan yang terjadi di tengah masyarakat karena minyak tanah sulit diperoleh bukan disebabkan stok tidak mencukupi. Tapi, hal itu terjadi akibat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan harga yang mendorong terjadinya pengoplosan ataupun penyelundupan.

"Dari sisi stok BBM nasional cukup aman pada kisaran 23 hingga 25 hari," kata Purnomo.

Ia mengakui, perbedaan harga merupakan salah satu pendorong tindakan tidak terpuji dari sege-lintir masyarakat yang menginginkan keuntungan yang lebih besar dengan menjual minyak tanah tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebab, adanya perbedaan

harga itu maka minyak tanah dipergunakan sebagai bahan oplosan dengan dicampur solar ataupun dengan bensin dengan harapan harga jualnya menjadi lebih tinggi.

"Untuk mengatasi pengoplosan dan penyeludupan itu telah dilakukan upaya diantaranya dengan melakukan sidak (inspeksi mendadak) dan menindak pelaku-pelakunya," kata Purnomo.

Di sisi lain lanjut dia, pemerintah juga sedang mengupayakan agar minyak tanah diberi warna lagi dengan harapan dapat mengurangi praktek pengoplosan dan penyeludupan. Hanya saja hal itu masih terkendala oleh biaya pewarnaan yang tidak sedikit.

"Pewarnaan itu perlu ongkos dan nilainya tidak sedikit, maka perlu dicarikan jalan agar penda-naannya bisa ditutupi," katanya.

Dalam mengatasi kelangkaan minyak tanah di masyarakat, pemerintah dan Pertamina sepakat untuk terus melaksanakan operasi pasar (OP) sampai situasi kembali normal. "Kami akan melakukan OP minyak tanah, tapi pelaksanaannya harus dicermati agar penyalurannya benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkannya," kata Purnomo.

Sebelumnya, Pertamina berni-

at secepatnya melakukan pewarnaan kembali minyak tanah bagi kebutuhan rumah tangga menyusul kelangkaan komoditas tersebut dalam tiga bulan terakhir ini. Pewarnaan itu paling lambat awal Maret mendatang.

Manager Hupmas Pertamina Hanung Budya mengakui, salah satu penyebab terganggunya pasokan untuk rumah tangga karena terhentinya pemberian warna minyak tanah untuk rumah tangga. "Memang ada indikasi minyak tanah yang tidak lagi diwarnai sejak tiga bulan lalu itu mulai diselewengkan, entah dijual ke industri atau untuk oplosan. Karena itu, program pewarnaan kembali kami nilai penting, dan harus dilakukan secepatnya," kata Hanung.

Ketua Sub Komisi Tim Pelaksana Penanggulangan Penyalahgunaan (TP3) Terpadu BBM Tjetjep Ahmad mengakui penghapusan perwarnaan menjadi salah satu penyebab terjadi gangguan distribusi minyak tanah ke masyarakat. "Tanpa pewarnaan, oknum pebisnis migas leluasa menyelewengkan minyak tanah untuk rumah tangga ke industri. Karena tanpa pewarnaan, minyak tanah untuk industri dan rumah tangga warnanya sama," katanya. (31/22)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 15 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

## Harga Minyak Diprediksi Turun pada Bulan Maret

JAKARTA, KOMPAS — Harga minyak mentah di pasar internasional diperkirakan akan terus mengalami penurunan pada bulan Maret 2004, seiring penurunan permintaan minyak mentah yang telah terpola dalam periode tersebut.

Demikian diutarakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/2). Namun, hingga saat ini berapa besar penurunan kebutuhan minyak mentah dunia belum dapat dikalkulasi.

Menurut Purnomo, yang juga Presiden Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), perkiraan perubahan konsumsi minyak mentah dunia tersebut telah mendorong OPEC untuk mengagendakan pertemuan pada bulan Maret 2004. Organisasi yang beranggotakan sepuluh negara ini akan mengkaji ulang kuota produksi yang telah ditetapkan pada bulan Januari 2004.

Menyinggung kebijakan OPEC mengenai penetapan kuota, Purnomo menegaskan, OPEC tetap berpegang pada stabilisasi harga. Jika melihat kondisi saat ini, permintaan dan harga akan masih tinggi karena faktor nonfundamental.

Harga minyak OPEC hari Senin tercatat 30,20 dollar AS per barrel, atau naik tiga sen dollar AS dibandingkan dengan harga akhir pekan lalu yang hanya 30,17 dollar AS per barrel.

### Bagi hasil

Pada kesempatan yang sama, Purnomo juga menegaskan bahwa usulan perubahan bagi hasil dengan kontrak pertambangan minyak dan gas hanya akan berlaku bagi kontrak-kontrak yang baru. Hal itu sebagai insentif karena adanya peraturan baru yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kini pemerintah menerapkan Bea Masuk terhadap barang impor, Pertamina juga dikenakan Bea Masuk. Padahal, untuk kegiatan migas selama ini dibebaskan. Jika hal ini dibiarkan, investor keberatan karena pendapatan mereka akan menurun," ujar Purnomo.

Bila kebijakan ini tidak diubah, sektor migas akan menghadapi kerawanan akibat menurunnya investasi. Jadi, usulan tersebut sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan investasi.

### Pertamina berhemat

Sementara itu, dalam siaran pers Pertamina, disebutkan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) ini, mulai Januari 2004 memasarkan sendiri produk paraxylene dan hidrokarbon aromatik murni (benzene) yang diproduksi oleh Kilang Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap. Langkah ini diharapkan akan membuat perusahaan meningkatkan keuntungan yang cukup signifikan.

Pada masa lalu, produk tersebut dipasarkan melalui *off-take agreement* Pertamina dengan Chevron Phillips Chemicals (CPChem) sebagai bagian dari skema pendanaan proyek. Tanpa keterlibatan CPChem, Pertamina bisa berhemat 10 juta dollar AS per tahun. Penghematan berasal dari komisi (*fee*) yang tidak lagi dibayarkan kepada CPChem sebesar 52 dollar AS per ton untuk paraxylene dan 36 dollar AS per ton untuk benzene.

Kerja sama Pertamina dengan CPChem tersebut sudah berlangsung selama 14 tahun sejak Pertamina mulai memproduksi kedua produk petrokimia tersebut. Berakhirnya kerja sama tersebut menunjukkan keberhasilan Pertamina dalam mempercepat pembayaran utang proyek serta memperoleh keuntungan yang optimal dari penjualan produk.

Bisnis aromatik ini pertama kali dilakukan Pertamina pada kuartal keempat tahun 1990 dengan ditandai dengan pengapalan perdana produk benzene sebanyak 7.000 metric ton (MT) dari Cilacap. Sebagai produk petrokimia, pemrosesan benzene dan paraxylene memerlukan teknologi dan pendanaan yang cukup tinggi dan dalam pemasarannya pun menghadapi sinkronisasi yang kuat sehingga perlu melakukan aliansi strategis, ataupun merger dengan perusahaan yang berpengalaman dalam bidang ini.

Produk petrokimia merupakan produk yang kompetitif dan harganya sangat fluktuatif sehingga diperlukan strategi pemasaran spesifik. Membaiknya kondisi pasar mendorong Pertamina untuk mengakhiri kerjasama itu dan melunasi pinjamannya. (BOY)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : \ \	
TAHUN 2004	

Manajer Hupmas Pertamina Hanung Budya:

## Pengalihan Minyak Sulit Dicegah

Mafia minyak tanah sungguh bejat. Jatah minyak tanah untuk rumah tangga ditilep begitu saja. Diduga minyak tanah tersebut dialihkan ke kalangan industri yang kebutuhan minyak tanahnya mencapai ribuan liter sehari. Bayangkan, jika tiap liter bisa 'menghemat' Rp 1.100. Berapa biaya yang 'be' asil' dihemat oleh kalangan industri jika menggunakan minyak rumah tangga.

**K**ONDISI ini makin diperparah dengan kebijakan Pertamina yang ragu-ragu menerapkan pewarnaan (*marker dyes*) terhadap minyak tanah untuk rumah tangga. Sehingga, tidak ada perbedaan antara minyak tanah rumah tangga dan industri. Karena tidak pembeda, maka

agen dan pangkalan semakin luasa untuk berbuat "nakal". Yakni melarikan minyak tanah untuk rumah tangga ke industri. Sebab, keuntungannya cukup besar. Pertamina melepas minyak tanah industri dengan harga Rp 1.800 per liter. Sedangkan, untuk rumah tangga dilepas dengan harga Rp 700 per liter. Selisih harga ini yang dicari pada agen dan pangkalan nakal ini.

Apalagi, Pertamina tampaknya tak mau rugi. Sebelum ada kejelasan, siapa yang akan menanggung biaya pengadaan *marker dyes* ini, Pertamina tak mau melanjutkan pewarnaan terhadap minyak tanah untuk rumah tangga itu. Namun hal ini dibantah Manajer Hubungan Pemerintah dan Masyarakat (Hupmas) Pertamina Hanung Budya Yuktyanta.

*Kelangkaan minyak tanah yang terjadi belakangan ini, karena banyak minyak tanah untuk rumah tangga yang beralih ke industri, setelah tidak adanya lagi pewarnaan?*

Yah, itu hanya salah satunya saja. Pewarnaan itu adalah salah satu mekanisme kontrol itu untuk mengurangi terjadinya pengalihan minyak tanah untuk rumah ke industri.

Kita memang sulit mencegah pengalihan ini. Meski sudah diberi warna, tetap saja terjadi pengalihan. Coba anda lihat di sepanjang Pantura Jawa, pengalihan ini terjadi secara terang-terangan.

*Lalu kenapa pewarnaan itu dihentikan?*

Pewarnaan itu sebetulnya hanya uji coba saja, dan sudah berakhir November lalu. Uji coba itu

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efek ini mampu mencegah terjadi pengalihan ini. Ternyata efeknya hanya sedikit.

*Tetapi minimal dengan ada pewarnaan ini lebih mudah membedakan minyak tanah yang ditujukan untuk rumah tangga dan minyak tanah untuk rumah tangga?*

Ya. Pewarnaan itu memang bisa membedakan minyak tanah untuk rumah tangga dan minyak tanah untuk industri.

*Apakah pewarnaan itu akan dilakukan lagi?*

Kita bakal mulai lagi pewarnaan paling lambat akhir bulan depan.

*Sebenarnya apa kendala pewarnaan ini?*

Kita tidak ada kendala sama sekali. (IMI)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
---	---

KODE :  LISTRIK  PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI  
 MIGAS  UMUM

JAN	<b>FEB</b>	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	<b>25</b>	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 10 TAHUN 2004

■ Bisnis Migas

## Perubahan *Split* Bagi Hasil Hanya Berlaku untuk Kontrak Migas Baru

Jakarta, NERACA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) Purnomo Yusgiantoro menegaskan, usulan perubahan bagi hasil untuk Kontraktor Production Sharing (KPS) hanya diterapkan pada kontrak-kontrak migas yang baru. Sedangkan kontrak yang masih berjalan (*existing contract*) masih tetap menggunakan *split* yang berlaku saat ini, yaitu 70% dan 30% untuk gas, serta 85% dan 15% untuk minyak.

"Jadi saya tegaskan, perubahan *split* hanya untuk kontrak-kontrak migas baru. Langkah ini penting menurut saya sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan investasi," kata Purnomo, kepada wartawan, di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan Purnomo yang juga Presiden OPEC itu, kebijakan ini terpaksa diambil menyusul adanya kebijakan pemerintah untuk mengenakan bea masuk pada barang-barang impor untuk kegiatan migas. Selama ini barang-barang tersebut memang bebas bea masuk.

"Ke depan, bea masuk ini akan dikenakan pada barang impor untuk kegiatan migas. Pertamina pun akan dikenakan pula. Padahal kegiatan migas pasti menggunakan barang impor sehingga akan menelan dana cukup besar," katanya.

"Jika kebijakan itu diterapkan tanpa ada insentif baru, lanjut Purnomo maka investor akan mengalami penurunan pendapatan. Akibatnya investasi di sektor migas akan mengkhawatirkan. "Makanya agar investasi di migas tetap berjalan, DESDM usulkan adanya perubahan *split* pada kontrak migas yang baru," tuturnya.

Sebelumnya, BP Migas telah mengusulkan kepada pemerintah agar investor sektor migas diberikan insentif tambahan persentase pola bagi hasil khususnya untuk daerah-daerah tertentu yang berada di pelosok (*remote area*).

Kepala BP Migas Rachmat Sudibyo sendiri cukup optimis jika pemerintah memberikan insentif tersebut lebih besar dibanding yang ditetapkan saat ini sebesar 70:30 untuk gas dan 85:15 bagi minyak maka daerah dipedalaman seperti di Kalimantan akan diburu investor.

"Barangkali sudah waktunya bagi kita untuk melihat kembali paket insentif yang baru, namun hal tersebut tidak diberlakukan secara nasional melainkan hanya untuk daerah-daerah tertentu," kata Rachmat.

Menurut dia, perubahan pola bagi hasil terutama ditujukan untuk daerah-daerah tertentu yang risikonya tinggi dan prospeknya tidak terlalu besar. "Perubahan itu patut diberikan guna merangsang investor masuk masuk ke sana. Namun, besarnya berapa harus berdasarkan kajian," kata Rachmat.

Disebutkan, perubahan pola bagi hasil ini mutlak dibutuhkan di tengah iklim investasi nasional saat ini. Selain memperhitungkan risiko yang ada pada setiap daerah yang ditawarkan.

Purnomo sebelumnya juga pernah mengusulkan agar pola bagi hasil migas yang diterapkan saat ini perlu ditinjau ulang. "Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat investasi di sektor migas menjadi lebih bergairah."

*Neraca* mencatat, BP sendiri juga telah meminta Pertamina untuk menerapkan pola bagi hasil kepada pihak lain dengan jumlah yang tidak lebih besar dari sistem kontrak bagi hasil (Kontraktor Production Sharing/KPS). Wakil Kepala BP Migas, Kardaya Warnika mengatakan, pola bagi hasil sebesar itu hendaknya berlaku bagi seluruh KPS yang bekerjasama dengan Pertamina, tak terkecuali untuk ExxonMobil Oil Indonesia di lapangan Cepu, Jawa Timur.

"Jika ingin kerjasama dengan pihak lain, maka bagi hasilnya (*split*) tidak boleh melebihi *split* KPS. Kalau lebih besar jelas merugikan pemerintah," kata Kardaya, beberapa waktu lalu.

Pertamina sendiri saat ini memiliki sejumlah lapangan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan pola KPS. Pemerintah sendiri telah memberikan hak khusus kepada Pertamina dengan pola bagi hasil yang melebihi KPS, yaitu 60% untuk pemerintah dan 40% bagi Pertamina. Sementara, pola bagi hasil yang umum berlaku bagi KPS saat ini adalah 80% untuk pemerintah dan 20% untuk KPS.

Menurut Kardaya, hak khusus tersebut diberikan selama Pertamina masih dimiliki negara 100%. "Sementara, jika Pertamina sudah go public, maka hak itu tak akan diberikan lagi," ujarnya.

Ditambahkan, penerapan bagi hasil yang lebih besar bagi mitra Pertamina itu juga tidak berbentuk *farm out/farm in* (jual beli saham) dengan saham penyertaan (*participating interest*) dari wilayah kerja. (\* / 22)

20

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input checked="" type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 12 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

Terkait Bea Masuk Impor:

## DESDM Usulkan Kenaikan *Split* Bagi Hasil Migas

### Jakarta, Investor

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pihaknya akan mengusulkan perubahan *split* bagi hasil kegiatan migas, dengan menaikkan porsi bagian untuk kontraktor dan menurunkan bagian pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi ketentuan Bea Masuk (BM) barang impor yang dibebankan kepada kontraktor.

"Kalau *split* tidak berubah, maka investasi migas perlahan akan ditinggalkan karena pendapatan investor berkurang drastis akibat ketentuan bea masuk ini," kata Purnomo di Jakarta, Selasa (24/2).

Menurut Purnomo, dengan diberlakukannya BM ini, maka se-

tiap perusahaan migas, tidak kecuali Pertamina akan mendapat beban biaya yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Hal ini mengingat kegiatan migas sebagian besar menggunakan produk impor dalam jumlah yang besar. "Selama ini, dengan *split* umum 85:15 untuk minyak dan 70:30 untuk gas diberi dengan asumsi bea masuk tidak diberlakukan. Maka, kenaikan *split* bagi kontraktor ini untuk mengimbangi beban mereka," kata Purnomo.

Menurut Purnomo, perubahan *split* ini memang hanya dapat diberlakukan untuk kontrak baru, khususnya pada masa penawaran 10 wilayah migas yang akan dilakukan pemerintah tahun ini. Sementara untuk kontrak yang telah

berjalan (*existing contract*), tetap menggunakan ketentuan lama. Namun, berapa besar bagi hasil yang akan diberikan, Purnomo mengatakan tergantung kondisi masing-masing lapangan. "Jadi, ketentuan ini tidak bisa di *gebyar* *uyah*. Tergantung kondisi lapangan, misalnya lokasi, tingkat risiko dan lainnya," jelas Purnomo.

Usulan tersebut, kata Purnomo, akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya, mengingat hal ini menyangkut pendapatan negara.

Sebelumnya, Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) Rachmat Sudibyo pernah mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi insentif tambahan bagi

investor berupa penambahan persentase pola bagi hasil migas. "Barangkali sudah waktunya bagi kita untuk melihat kembali paket insentif yang baru, namun hal tersebut tidak diberlakukan secara nasional melainkan hanya untuk daerah-daerah tertentu," kata Rachmat.

Ia meyakini, jika pemerintah memberikan bagi hasil yang jauh lebih besar ketimbang yang ditetapkan saat ini yaitu 70:30 untuk gas dan 85:15 untuk minyak, maka daerah di pedalaman seperti di Kalimantan akan diburu investor. Dikatakan Rachmat, perubahan pola bagi hasil ini mutlak dibutuhkan di tengah iklim investasi nasional saat ini. Selain memperhitungkan risiko yang ada pada setiap daerah yang ditawarkan. ● eis

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN <b>FEB</b> MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    17 18 19 20 21 22 23 24 <b>25</b> 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 10 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

■ Migas

## Pemprov Kaltim Tawarkan 5 Lapangan Migas Baru

### Samarinda, NERACA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menawarkan lima wilayah kerja penambangan baru minyak dan gas (migas) yang diperkirakan memiliki kandungan Migas ekonomis untuk diproduksi. "Penawaran lima wilayah kerja pertambangan migas itu tersebar di beberapa kabupaten dan kota itu diharapkan dapat menarik investor untuk melakukan eksplorasi," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim, Masriyadi, di Samarinda, kemarin.

Disebutkan, lima lapangan migas itu adalah berlokasi di Kabupaten Nunukan terdapat dua lokasi, yakni Kecamatan Nunukan dan Tigau. Kabupaten Bulungan juga dua lokasi, yaitu di Bulungan dan Ambalat Timur dan lokasi lainnya di Kota Bontang.

"Lokasi penambangan Migas baru ini kami tawarkan kepada sejumlah investor yang berminat melakukan eksplorasi dan eksploitasi apabila kandungan Migasnya dianggap ekonomis," katanya.

Hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis di tiga kabupaten/kota itu, disepakati bahwa masing-masing pemerintah daerah akan

memberikan respon positif bagi investor yang berminat melakukan eksplorasi dan berlanjut pada eksploitasi.

Guna mendukung lancarnya pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi itu, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjalin kerjasama komunikasi saling keterbukaan, guna terjalin sinergi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di lapangan.

Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) diharapkan bisa membantu kelancaran penawaran tersebut, sehingga pada 2004 ini ada investor yang siap mengeksplorasi dan eksploitasi block tersebut. "Sebab, pada 2003 lalu BP Migas mampu menarik 15 pengusaha dalam bentuk kerjasama Production Sharing Contract (PSC) yang sebagian besar penanam modal asing (PMA) dan sebagian lagi penanam modal dalam negeri (PMDN)," katanya seperti dikutip *Antara*.

Penawaran itu juga dite-kankan agar setiap investor per-tambangan Migas bisa memanfaatkan tenaga kerja dari Indonesia, terutama pekerja lokal yang tentunya disesuaikan dengan klasifikasi dan keahlian bidang kerja. (\* / 22)

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (25) 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 1 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

# Perubahan *split* migas tak jamin gaet investor

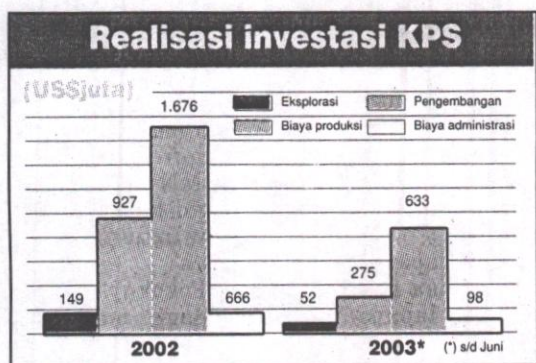
JAKARTA (Bisnis): Kalaupun pelaku di perusahaan minyak dan gas bumi (migas) menilai perubahan komposisi bagi hasil (*split*) migas yang diusulkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak menjamin investor menanamkan modalnya di sektor itu.

Sumber *Bisnis* di industri migas menuturkan hal utama yang membuat investor tertarik menanamkan modalnya di sektor migas yakni adanya jaminan pemerintah di bidang keamanan dan kepastian hukum.

"Bagi KPS [kontraktor *production sharing*], keamanan beroperasi, serta peraturan yang jelas mengenai perpajakan dan retribusi merupakan hal yang penting. Perubahan *split* yang diusulkan tersebut bukannya tidak menarik, tapi bagi investor hal itu bukan yang utama," tuturnya tadi malam.

Komposisi bagi hasil, kata sumber tadi, dapat dibicarakan secara langsung antara calon investor dengan pemerintah. Selain itu, lanjutnya, besarnya bagi hasil tidak dapat disamakan mengingat lokasi dan tingkat kesulitan beroperasi setiap KPS berbeda.

Dia menyatakan hal itu berkait-



Sumber: BP Migas diolah

Bisnis/yl

an dengan usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro untuk memberikan insentif migas yang lebih besar lagi kepada calon investor.

Usai memberikan sambutan dalam acara Rakorkam II PT PLN (Persero), dengan tema *PT PLN Sebagai Obyek Vital Siap Berperan Menyukseskan Pemilu 2004*, Purnomo kembali menegaskan usulan yang diajukan pada Sidang Kabinet, pekan lalu itu, dimaksudkan untuk menarik masuknya investor dalam menggarap sumber migas baru di Tanah Air, khususnya di kawasan *frontier* dan laut dalam.

"Penghapusan *lex specialist* dan pemberlakuan bea masuk di sektor migas, sama artinya mengurangi insentif KPS karena harus membayar *import duties* hingga triliunan

rupiah."

Menurut dia, sebagai departemen teknis, instansi yang dipimpinnya itu hanya bisa memberikan insentif dalam hal bagi hasil, di mana bagian KPS diusulkan untuk diperbesar dari yang ada saat ini. Adapun besarnya disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan risiko kegagalan dalam mengeksplorasi sumber cadangan migas yang

baru.

Sumber *Bisnis* di perusahaan migas lainnya menuturkan langkah yang diambil pemerintah untuk memberikan bagian yang lebih besar lagi kepada calon investor belum tentu menguntungkan mereka.

"Secara objektif dapat dikatakan ketika *split* bagian KPS diperbesar, tapi ternyata dikompensasikan dengan pembayaran pajak yang lebih tinggi. Hal ini tetap tidak menguntungkan investor," tuturnya kepada *Bisnis*.

Untuk itu, dia mengatakan investor akan mengevaluasi draf perubahan bagi hasil yang diajukan oleh pemerintah,

berkaitan dengan adanya kompensasi atas besarnya bagi hasil yang diterima KPS.

#### **Tengah dikaji**

Purnomo menjelaskan saat ini Dirjen Migas tengah melakukan kajian tentang besaran perubahan bagi hasil tersebut.

"Hasil kajian di Ditjen migas ini nantinya diharapkan bisa diterapkan pada penawaran 10 blok baru yang rencananya ditawarkan pada Juni 2004 nanti," ujarnya.

Menurut dia, perubahan bagi hasil migas yang diberlakukan pemerintah bertujuan untuk menarik investor masuk ke Indonesia.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, sejak 1998 hingga 1994, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (sebelumnya Departemen Pertambangan dan Energi) sudah menggulirkan empat paket insentif di sektor migas yang intinya menawarkan kemudahan dalam hal perpajakan, kredit investasi, dan perubahan komposisi bagi hasil. (dle/zuf)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 5	
TAHUN 2004	

## Optimisme KUFPEC Mencari Potensi Sumber Minyak Baru di Indonesia

The Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) adalah salah satu anak perusahaan Kuwait Petroleum Corporation (KPC). KPC adalah perusahaan induk yang menangani sektor perminyakan Kuwait dan dimiliki sepenuhnya Pemerintah Negara Kuwait. KUFPEC dibentuk pada bulan April 1981 dengan suatu misi untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi Negara Kuwait dengan cara mencari dan memproduksi hidrokarbon di seluruh dunia secara menguntungkan.

Visi KUFPEC adalah menjadi salah satu penyumbang devisa utama bagi negara Kuwait. Sasaran perusahaan ini adalah mencapai produksi sebesar 100.000 boepd pada tahun 2010 di samping mempertahankan laju kembali modal jangka panjang rata-rata yang lebih besar dari yang ditawarkan oleh investasi-investasi KPC lainnya.

KUFPEC saat ini aktif di sembilan negara, yaitu Tunisia, Mesir, Yaman, Sudan, Pakistan, Cina, Malaysia, Indonesia dan Australia dengan operasi produksi dilakukan di tujuh negara.

Di Indonesia, kiprah KUFPEC yang hadir dengan bendera KUFPEC (Indonesia) Limited, dimulai sejak melakukan Kontrak *Production Sharing* (KPS) untuk produk minyak bumi dan gas (migas) dengan Pertamina pada tahun 1985.

Keberhasilan KUFPEC memproduksi minyak di Bula, Pulau Seram, Maluku sejak akhir tahun 2002 lalu. Pada tahun itu, KUFPEC telah melakukan 3 D seismic di Pulau Seram. Dari hasil seismic tersebut, KUFPEC kemudian melakukan pemetaan mengenai struktur data seismic dan merencanakan untuk mengembangkan 15 Sumur tambahan dari dari Lapangan Oseil yang selama ini ada.

Pengembangan prospek ke-15 sumur baru ini akan dimulai pada bulan Juli 2004. Program pemboran ini akan berlangsung selama dua tahun. Satu sumur memerlukan waktu sekitar satu bulan dan menelan biaya sebesar USD 6 juta. Diperkirakan seluruh cadangan minyak yang ada di semua sumur Oseil ini berjumlah 62 juta barel.

Minyak mentah yang dihasilkan KUFPEC mengandung kadar sulfat tinggi (diatas 5 persen). Sehingga tidak mungkin menjualnya dalam bentuk *crude oil*. Karena itu KUFPEC membangun

sebuah fasilitas produksi. "Minyak yang dihasilkan di ladang Bula berbeda dari tempat lain karena memiliki kandungan belerang (*sulfur*) yang sangat tinggi," kata David GS Lamb, Presiden KUFPEC (Indonesia) Limited. Dia menambahkan, produksi yang telah dihasilkan KUFPEC antara lain HSFO (*High Sulfur Fuel Oil*) dan Naptha. Ekspor pertama produksi KUFPEC sebanyak 300.000 barel HSFO dilakukan ke Singapura pada Desember 2003.

Mengenai Oseil tahap 2, kata Lamb, investasi yang telah dilakukan KUFPEC sebesar USD110 juta, dari keseluruhan investasi USD261,5 juta yang berlangsung tahun 2004-2008. Perinciannya adalah tahun 2004 sebesar USD75,0 juta, tahun 2005 senilai USD92,9 juta, tahun 2006 sebesar USD32,7 juta, tahun 2007 senilai USD29,2 juta dan tahun 2008 sebesar USD31,7 juta.

"Dari tiga sumur yang telah beroperasi sebelumnya, kapasitas produksi minyak

KUFPEC adalah sebesar 5.000 barel per hari. Mulai bulan Juli 2004, kapasitas produksi KUFPEC diperkirakan akan naik dengan tambahan 15 sumur baru. Tambahan besar produksi dari 15 sumur baru tersebut sebesar 21.000 barel per hari. Kegiatan produksi ini akan berlangsung selama tujuh tahun hingga tahun 2011 mendatang," jelasnya.

Selain Pulau Seram sebagai *operated area*, KUFPEC memiliki *non-operated area* yang bekerja sama dengan Premier Oil, yaitu pada proyek Natuna Blok A (Lapangan Anoa). Tahun 2002, melalui proyek WNTS (West Natuna Transportation System) berhasil melakukan kegiatan ekspor gas langsung ke Singapura. Menurut Human Resource Supervisor Ichsan Samiron, dengan pulihnya Ambon khususnya dan Provinsi Maluku pada umumnya secara berangsur-angsur, diharapkan akan terjadi percepatan kembalinya para investor, baik yang ada di Provinsi Maluku sendiri maupun dari luar Provinsi Maluku. Diakuinya, dunia usaha khususnya perusahaan minyak sangat sensitif

terhadap faktor-faktor keamanan. "Dengan kembalinya KUFPEC ke sana, kami harapkan akan menjadi contoh baik investor lokal, nasional maupun internasional untuk kembali ke Ambon. Apalagi KUFPEC memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun potensi propinsi itu sendiri," ujarnya.

Ichsan menambahkan, kiprah KUFPEC di Indonesia memberikan kontribusi yang besar bagi iklim investasi di Indonesia. Melalui sukses tersebut, KUFPEC mendapat penghargaan dari pemerintah Indonesia sebagai perusahaan penemu minyak. Penghargaan tersebut diberikan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral waktu itu, yakni Purnomo Yusgiantoro dalam rangka the Second Stakeholders Meeting on Oil and Gas Business.

Mengenai kebijakan investasi yang diterapkan pemerintah saat ini khususnya menyangkut peran serta investor asing dalam

memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia, President KUFPEC (Indonesia) Limited David GS Lamb mengatakan Pemerintah Indonesia berupaya bersikap lebih fleksibel terutama berkaitan dengan masalah kontrak perjanjian mengenai pembagian keuntungan. Apalagi saat ini KUFPEC menaruh minat yang besar pada dua blok lainnya, yaitu di Aceh dan Papua.

Lamb menambahkan sikap Pemerintah Indonesia ini berkaitan dengan pertimbangan terhadap resiko yang harus dihadapi investor, terutama yang berkaitan dengan situasi daerah di tempat mereka beroperasi, khususnya menyangkut daerah-daerah konflik.

Artinya, sudah menjadi kewajaran jika para investor yang menanggung atas segala resiko usaha mereka pada akhirnya mendapat penghargaan yang lebih dalam bentuk keuntungan yang wajar. "Jika kita melihat besarnya resiko dari situasi yang dihadapi dunia usaha, tentunya konsekuensi logis yang sesuai adalah pada persoalan besarnya *reward* yang bisa kita dapatkan," katanya.

Lamb mengatakan, saat ini kontrak pembagian keuntungan berkisar 35 persen untuk kontraktor dan 65 persen untuk pemerintah (setelah pajak).

Jika dibandingkan pada periode 10 tahun silam, angka cukup realistis.

Karena saat itu, perbandingannya adalah 15 persen untuk kontraktor dan 85 persen untuk pemerintah. "Jika suatu negara bermaksud menarik investor (asing), negara tersebut harus memiliki sikap yang fleksibel, kompetitif dan juga memiliki stabilitas politik dan sosial yang relatif baik," katanya.

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN <b>FEB</b> MAR   APR   MEI   JUN   JUL   AGST   SEPT   OKT   NOV   DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   17 18 19 20 21 22 23 24 <b>25</b> 26 27 28 29 30 31	TAHUN 2004
HALAMAN : 11	

Selama Tiga Bulan aja Negera  
Dirugikan Rp 26 Miliar

# Pewarnaan Minyak Dihilangkan, Penyelundup Makin Enak-enakan

Lagi-lagi masyarakat jadi korban. Gara-gara pewarnaan untuk minyak tanah dihapuskan, penyelundupan BBM makin menjadi-jadi. Jatah minyak untuk konsumsi rumah tangga kerap dialirkan ke kalangan Industri. Negara pun dirugikan miliaran rupiah.

**S**IANG hari pertengahan Februari lalu. Yanto terkaget-kaget ketika pangkalan minyak tanah miliknya yang terletak di Jalan Raya Bogor, Cisarak, Depok didatangi puluhan orang. Kedatangan puluhan orang ini bukan bermaksud membeli minyak tanah. Tetapi kedatangan rombongan pejabat Pertamina, Tim Pelaksana Penanggulangan Penyalahgunaan (TP3) BBM, dan para wartawan ini untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) menanggapi kabar kelangkaan minyak tanah yang melanda Jabodetabek beberapa waktu belakangan.

Setelah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yanto, rom-

bongan tersebut akhirnya meninggalkan pangkalan minyak tanah miliknya. Mereka gagal menemukan adanya minyak tanah selundupan yang biasanya dialirkan ke industri.

Selepas sidak, Manajer Hubungan Pemerintah dan Masyarakat Pertamina Hanung Budya Yuktyanta berjanji segera melakukan operasi pasar di sejumlah wilayah yang diduga mengalami kelangkaan minyak tanah. Apakah lantas persoalan kelangkaan ini selesai? Tentu tidak. Sebab, ternyata di sejumlah daerah masih ditemukan adanya kelangkaan.

Ketika ditemui RM, Ketua TP3 BBM Slamet Singgih punya jawaban atas kelangkaan minyak tanah di Jabodetabek beberapa bu-



**ADA PERMAINAN.** Jatah minyak tanah untuk rumah tangga kerap diselundupkan.

lan terakhir. Menurut pensiunan jenderal ini, kelangkaan tersebut terjadi karena banyak minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga yang dialihkan ke industri.

Singgih berbicara bukan tanpa dasar. Dari berbagai sidak yang dilakukan tim terpadu (Timdu) BBM memang ditemukan minyak tanah untuk rumah tangga yang diselundupkan ke industri. Pada 30 Januari lalu, sidak di pangkalan milik Anwar di Kampung Babakan,

Bantargebang, Bekasi, ditemukan 11.200 liter minyak tanah yang dilarikan ke industri.

Lalu, sidak di sebuah pangkalan di Kampung Cikremis, Cileungsi, Bogor pada 4 Februari lalu. Dari hasil sidah ini, diketahui 71.000 liter untuk rumah tangga yang dijual ke industri. Pada 12 Februari, Timdu sudah mendapati sebuah pangkalan di Rawa Bokor, Benda, Tangerang yang telah mengalihkan 4.300 liter minyak tanah untuk kalangan industri.

Selanjutnya, Timdu juga berhasil menemukan sebuah pabrik genteng di Citeureup, Bogor. Di situ, mereka berhasil membongkar adanya penjualan minyak tanah rumah tangga sebanyak 2.100 liter. Minyak tanah itu untuk operasional pabrik tersebut.

Memang belum diketahui jumlah pasti jatah minyak tanah rumah tangga yang jatuh ke industri. Diakui Singgih, sidak Timdu hanya berhasil mengungkap sebagian kecil penyelewengan penyaluran minyak tanah yang telah terjadi. "Mungkin jumlahnya tidak sampai 10 persen dari total keseluruhan minyak tanah yang diselundupkan ke industri," ujarnya.

Pengalihan besar-besaran minyak tanah ini, kata Singgih, terjadi ketika Pertamina menghentikan pewarnaan (*marker dyes*) pada minyak tanah rumah tangga, sejak Desember 2003 lalu. Sehingga, antara minyak tanah rumah tangga dan konsumsi industri

tidak ada perbedaan sama sekali.

Konon, Pertamina menghentikan pewarnaan karena belum ada kejelasan siapa yang akan menanggung biaya pewarnaan itu. Direktur Hilir Pertamina Hari Purnomo sempat menanyakan hal ini kepada Dirjen Migas Departemen ESDM lewat suratnya bernomor 010/E00000/2004-S3 tertanggal 5 Januari 2004.

Dirjen Migas lalu membalas lewat surat bernomor 737/DMO/2004 tertanggal 20 Januari 2004. Isinya, Pertamina diminta segera mengadakan *marker dyes*. Sedangkan, biaya pengadaanya dimasukkan sebagai elemen biaya dalam perhitungan pokok harga BBM.

Merasa tak puas dengan jawaban itu, Hari Purnomo lalu mengirim surat kepada Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.

Dalam surat bernomor 059/E00000/2004-S3 tertanggal 15 Januari 2004, Pertamina meminta

penegasan mengenai pembebanan biaya pemakaian *marker dyes*. Padahal, sebelumnya, Menteri ESDM sudah menetapkan dalam suratnya bernomor 4149/24/MEM.M/2003 tertanggal 31 Desember 2003 tentang pemakaian *marker dyes*. Salah satu isi surat itu menyatakan, beban pemakaian pewarnaan kepada minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga ditanggung oleh pemerintah.

Singgih tak habis pikir, mengapa Pertamina tidak melanjutkan pewarnaan ini karena belum adanya kejelasan pembebanan biaya pewarnaan ini. "Pertamina konyol menghentikannya," cetusnya. Menurut dia, Pertamina seharusnya tak perlu terlalu mempersoalkan beban biaya pewarnaan ini. Biaya pewarnaan hanya Rp 3 per liter minyak tanah. Total mengadakan *marker dyes* selama setahun yakni Rp 12 miliar. Sejak Pertamina menghentikan pewarnaan, Desember lalu, negara sudah dirugikan sudah dirugikan Rp 26,5 miliar.

Kerugian negara ini berasal dari selisih harga jual minyak tanah rumah tangga dengan harga jual industri. Pertamina melepas minyak tanah untuk rumah tangga dengan harga Rp 700 per liter. Sedangkan untuk industri Rp 1.800 per liter.

Manajer Hubungan Pemerintah dan Masyarakat (Hupmas) Pertamina, Hanung Budya Yuktyanta membantah dihentikan pewarnaan karena ada kendala pembebanan biaya ini. "Kita tidak ada kendala sama sekali," ujarnya.

Menurut dia, pewarnaan dihentikan karena sudah habis masa uji cobanya pada November 2003 lalu. Lagi pula, dampak pewarnaan sangat kecil untuk mengatasi maraknya penyimpangan penyaluran minyak tanah ini. Meski begitu, Pertamina akan memulai kembali pewarnaan terhadap minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga itu. "Kita akan mulai lagi pewarnaan paling lambat akhir bulan depan," ujarnya. (IMI)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 2	
TAHUN 2004	

# Pemerintah Sulit Tambah Jatah Minyak Tanah

JAKARTA (Media): Pemerintah kesulitan menambah kuota minyak tanah sektor rumah tangga pada tahun ini, karena konsekuensinya harus menambah alokasi subsidi BBM yang telah ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, aparat masih sulit untuk menindak kasus penyelewengan minyak tanah bersubsidi.

"Untuk sekarang saat ini pemerintah dan Pertamina masih mengikuti kuota BBM yang telah diatur dan ditetapkan dalam APBN," ujar Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro usai menghadiri rapat koordinasi keamanan (rakorkam) II di kantor pusat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jakarta, kemarin.

Menurut Purnomo, sejauh ini subsidi BBM telah ditetapkan dalam APBN 2004 sebesar Rp14,5-Rp15 triliun. Masalahnya, volume pengadaan BBM telah dibatasi dalam APBN 2004 sekitar 60 juta kiloliter (kl) per tahun, termasuk 11,6 juta kl untuk alokasi minyak tanah.

Dijelaskan, perhitungan volu-

me ini erat kaitannya dengan subsidi yang diberikan pemerintah kepada Pertamina. Apalagi, volume minyak tanah kali ini 2,5% lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya, volume minyak tanah itu dijatah oleh Pertamina berdasarkan volume per hari dan permintaan per wilayah. "Apabila ada tambahan volume di luar jatah yang telah dialokasikan maka ada kelangkaan di wilayah itu," jelas menteri ESDM.

Meski demikian, kata Purnomo, dalam menghadapi masalah

kelangkaan pasokan minyak tanah pemerintah masih mempunyai stok BBM nasional untuk 23-25 hari.

Menteri ESDM menambahkan, langkah yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan operasi pasar di wilayah yang mengalami kelangkaan pasokan minyak tanah. Tetapi, hal itu tidak serta-merta dilakukan sebelum diselidiki dulu, apakah daerah itu memang mengalami kelangkaan atau tidak.

Sebab, bisa saja hal itu dilakukan oleh ulah dari beberapa pi-

hak yang menginginkan adanya volume lebih dengan mengembuskan isu kelangkaan minyak tanah.

Sejauh ini, pemerintah telah meminta Tim Pelaksana Penanggulangan Penyalahgunaan (TP3) BBM untuk lebih aktif mencegah terjadinya pengoplosan maupun penyelewengan minyak tanah ke industri.

Diakui Purnomo, kendati UU Migas secara tegas telah mengatur sanksi berat bagi pihak-pihak yang melakukan penyelewengan peruntukan BBM bersub-

sidi. Namun, realitasnya belum semua pelaku penyelewengan minyak tanah itu dihukum pidana.

"Hal ini adalah masalah hukum, sehingga proses pidana yang terjadi sangat sulit dilakukan, namun pemerintah akan berupaya untuk mengatasi hal ini," jelasnya.

Sedangkan, Manager Hupmas Unit Pemasaran (UPMS) III Pertamina Awi Adil mengatakan, untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah sektor rumah tangga di wilayah Jabotabek, dalam

seminggu ini pihaknya akan melakukan operasi pasar sebesar 100.000 liter.

Masing-masing 20 wilayah yang terkena operasi pasar yang telah dimulai Kamis (19/2) sampai Kamis minggu berikutnya (26/2) mendapatkan pasokan minyak tanah 5.000 liter. Wilayah operasi pasar antara lain tersebar di Cibinong (Bogor), Cimanggis (Depok), Kramat (Jakarta Pusat), Kedoya (Jakarta Barat), Kramat Jati (Jakarta Timur), Kapuk (Jakarta Utara), Karawaci (Tangerang) dan Serang. (Wis/E-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN (FEB) MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT (25) NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 18 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

## Minyak Tanah Langka, Warga Menjerit

TANGERANG, KOMPAS — Beban hidup warga dan pedagang kecil di DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bogor semakin berat menyusul kelangkaan dan kenaikan harga minyak tanah. Harga minyak tanah yang biasanya Rp 1.100 sampai Rp 1.200/liter kini menjadi Rp 2.000/liter, padahal pemerintah tidak menaikkan harga minyak tanah. Repotnya, harga sudah mahal, minyak tanah itu sendiri langka sejak bulan Januari 2004.

Taslin (32), pedagang gorengan, yang biasa mangkal di sekitar Alun-alun Achmad Yani, Tangerang, Selasa (24/2), menyatakan, minyak tanah sebagai bahan bakar utama makin sulit diperoleh. Tanpa minyak tanah, ia tak bisa berjualan gorengan. "Minyak tanah itu, hari ini ada, besok enggak ada," kata lelaki asal Cirebon tersebut sambil menunjuk botol berisi minyak tanah cadangan yang ia beli.

Ny Munirah (46), warga Perumahan Nasional II, Tangerang, juga merasakan hal yang sama. "Maunya ngirit, tetapi kalau minyak tanah susah dan mahal begini bagaimana bisa nabung. Minyak tanah mahal, bayar sekolah mahal, semuanya serba mahal. Mau diapakan kami rakyat kecil ini?" katanya tidak habis pikir.

Ny Supandi, warga Rawa Bamban, Kecamatan Benda, berbeda lagi. Untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah, ia kembali ke kayu bakar.

Mustam (46), pedagang gorengan keliling, saat ditemui di Kebon Nanas, Kota Tangerang, menyatakan, sejak minyak tanah langka dan harganya melonjak mencapai Rp 2.000, rasanya ia ingin berhenti berdagang. "Harga gorengan saya tidak seberapa karena banyak saingan, masih ditambah dengan harga minyak naik, anak-istri saya mau makan apa," ujar bapak lima anak ini.

### Bekasi

Di Bekasi, situasi yang lebih kurang sama dengan Tangerang sudah lama terjadi. Pasokan minyak tanah di sana sudah lama tersendat-sendat. Meskipun keluhan warga soal seretnya pasokan minyak tanah sudah berlangsung hampir tiga bulan, belum tampak upaya Pemerintah Kota Bekasi untuk membantu kesulitan warga tersebut.

Mutholib (40), pedagang di Kampung Kayuringin, Bekasi Selatan, mengatakan, pasokan minyak tanah mulai berkurang sejak Lebaran tahun lalu. Jatah minyak tanah yang didapatnya dari pangkalan minyak tanah langganan dikurangi, yang biasanya 20 jeriken (400 liter), kini hanya 12 jeriken untuk satu minggu. Kepada konsumen minyak tanah dijual mulai Rp 1.300-Rp 1.500 per liter.

Pedagang minyak keliling, Ali Munadi (35), mengatakan, dalam keadaan pasokan minyak tanah lancar setiap hari, ia dijatah 25 jeriken atau 500 liter.

Kini mengambil jatah dua hari sekali masing-masing 50 jeriken. Hal yang sama juga disampaikan Sadang, pedagang di Raya Joglo, Jakarta Barat. Tahun lalu, ia rutin mendapat suplai 300 liter per hari, kini pasokan menurun menjadi 60 liter/hari.

Keadaan sebaliknya tampak di Bogor. Kendati tidak mulus, suplai minyak tanah di kota ini relatif lebih baik dibandingkan dengan di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yuasgiantoro mengatakan, pasokan minyak tanah memang terganggu karena pengaruh faktor disparitas harga antara harga untuk kelompok rumah tangga dan kelompok industri. Perbedaan itu mendorong industri memakai minyak tanah bersubsidi yang dioplos dengan solar.

Selain itu, kendala menyulitkan minyak tanah dipengaruhi pembatasan volume pasokan BBM oleh pemerintah. Pemerintah membatasi penjualan BBM sebesar 61 juta kiloliter selama tahun 2004 karena menyangkut nilai subsidi.

Purnomo menegaskan, pemerintah akan meminta Pertamina melakukan operasi pasar agar dapat mengatasi kelangkaan minyak tanah. Selain itu, meminta Tim Pelaksana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak untuk aktif mengawasi pengoplosan minyak tanah.

(MAS/PUN/ELN/BOY)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input checked="" type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 4 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

## Perairan Balongan Kini Masih Tertutup

INDRAMAYU, (PR).-

Wilayah perairan Balongan, Kab. Indramayu dinyatakan tertutup bagi semua jenis pelayaran. Tak hanya kapal-kapal niaga, penutupan itu juga diberlakukan bagi perahu-perahu nelayan. Penutupan wilayah perairan itu, terkait dengan dimulainya kegiatan proyek pembangunan sarana tambat kapal tanker Pertamina.

Proyek bernilai puluhan miliar itu berupa pembuatan SPM 150.000 DWT dan SPM 35.000 DWT di perairan Balongan merupakan pengembangan dari Pelabuhan Khusus (Pelsus) Migas Pertamina Balongan. Pengerjaannya sudah dimulai dan rencananya akan memakan waktu paling lama 1 tahun.

Penutupan wilayah perairan itu juga dibarengi dengan pemasangan rambu-rambu di tempat tertentu di perairan tersebut. Intinya, seluruh jenis pelayaran, baik kapal niaga maupun perahu nelayan, diminta untuk tidak memasuki wilayah perairan tempat proyek itu dikerjakan.

"Kecuali kapal-kapal tanker migas yang mengirim atau mengangkut migas. Mereka bisa masuk dan berlabuh di Jeti Kilang Balongan karena ada jalur khusus," tutur sumber "PR" di Divisi Marine Pertamina UP-VI Balongan. Penutupan dilakukan sampai bulan Oktober 2004.

Kepala Syahbandar Indramayu, Drs. H.M. Aspuri Ilyas membe-

perairan Balongan. Diturunkan, penutupan itu sebagai antisipasi keselamatan kapal serta menghindari kemungkinan adanya kecelakaan.

"Ini sebagai antisipasi. Pertamina sudah memberi tembusan pada kami soal penutupan sementara itu. Dengan dimulainya kegiatan proyek, akan banyak sarana-sarana berat proyek di perairan itu," tutur dia.

Aspuri menjelaskan, penutupan itu yang diumumkan ke seluruh jaringan pelayaran. Yakni di sekitar proyek SPM 150.000 DWT di posisi 06 derajat, 16 menit dan 09,756 detik LS dan 108 derajat, 29 menit, 46,14 detik BT/E, di situ, jalur pelayaran sepanjang 15,43 km Q 16 detik, dari titik *starpoint* ke SPM dinyatakan tertutup.

Kemudian SPM 35.000 DWT di posisi 06 derajat, 18 menit, 24,783 detik LS dan 108 derajat, 28 menit, 00,65 detik BT/E. Jalur pelayaran atau wilayah perairan tertutup di sepanjang 10,46 km Q 16 detik dari *starpoint* ke SPM.

"Kedua fasilitas itu untuk *uploading* dan *backloading* BBM termasuk pembangunan jalur pipa bawah laut. Sudah ada pemasangan rambu-rambu," ujar Aspuri sambil menambahkan penutupan wilayah perairan itu sudah dikoordinasikan dengan Dirjen Hubla. Karenanya, kapal niaga dan perahu nelayan diimbau mematuhi rambu dan tidak mencari ikan di wilayah perairan tertutup tadi. (A-93)\*\*\*

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN <b>FEB</b> MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    17 18 19 20 21 22 23 24 <b>25</b> 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 17 <span style="float: right;">TAHUN 2004</span>	

**Kondisi DPPU di Biak Cukup Baik**

**M**ESKI dibangun sejak 1954, Depot Pengisian Penerbangan Udara (DPPU) Bahan Bakar Minyak (BBM) avtur di Frans Kaisepo (FK) Biak, Provinsi Papua, masih mampu menimbun dan menyalurkan jutaan liter avtur untuk kebutuhan lebih dari 300 pesawat udara setiap bulannya.

Kepala DPPU FK Pertamina Unit Pemasaran VIII Jayapura CH Latumeten mengatakan, kesiapan DPPU FK dalam proses pengisian avtur bagi setiap pesawat udara ini menyusul adanya penambahan maskapai penerbangan baru, yaitu Efata Papua Airlines.

Latumeten menambahkan, DPPU FK ini merupakan satu-satunya DPPU di Indonesia yang memiliki sistem pipa saluran hidran dan *refueller*. "Sistem ini telah mendapatkan penghargaan mutu kualitas ISO 9001," ujar Latumeten.

Berdasarkan pemeriksaan dari Lembaga Inspeksi Migas Cepu, kata Latumeten, kondisi pipa untuk menyalurkan BBM avtur di DPPU FK Biak masih dalam keadaan yang baik. (MY/N-3)

29

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 13	
TAHUN 2004	

# OPEC remains concerned at falling oil price

**Fitri Wulandari**  
The Jakarta Post  
Jakarta

The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) remains concerned at the likelihood of a declining oil price in the second quarter of this year when demand for heating fuel falls off.

OPEC President Purnomo Yugiartoro said demand for the fuel was expected to drop by 2.2 million barrels per day (bpd) to 2.4 million bpd.

"If (the oil price drop) materializes, we shall take measures to keep the price at US\$22 to \$28 at the end of March," Purnomo, who is also Indonesia's Minister of Energy and Mineral Resources, told a media conference on Tuesday.

OPEC, which produces a third of the world's oil, is scheduled to meet on March 31 in Vienna to discuss production policy.

OPEC ministers decided on Feb. 10 to reduce official output limits by one million bpd from 24.5 million bpd to 23.5 million bpd, starting from

April 1, excluding Iraq. It aims to avoid a price collapse in the second quarter when demand for oil falters as winter comes to an end in the northern hemisphere.

Oil prices continued to climb on concern at tight gasoline supply in the U.S. ahead of summer demand.

On Monday, U.S. Light crude for April traded up 19 U.S. cents at \$34.54, *Reuters* reported. Brent Crude for April on the International Petroleum Exchange in London climbed 14 U.S. cents to \$30.95.

Purnomo said the rising oil price was partly due to a longer winter in the northern hemisphere, which had prompted stronger demand.

Security disturbances in Iraq had also contributed to the high price.

"Security problems in Iraq have disturbed the country's oil production. It is not clear when Iraq will achieve its 3 million bpd target," Purnomo said.

Iraq currently produces 2.1 million bpd.

Purnomo said OPEC members could still produce oil above quota

as long as oil prices remained above \$28 per barrel for two more consecutive weeks.

"OPEC's basket price is still above \$28 per barrel, and it means (if it stays above \$28 per barrel), for two consecutive weeks OPEC (members) would be allowed to produce above the quota to bring the price below \$28 per barrel," Purnomo said.

OPEC's reference crude oil price, or basket of crude oil, was at \$30.17 per barrel on Friday. The price has been above \$28 per barrel since December 2003. OPEC's basket of crude is an index of seven oil grades.

Purnomo said OPEC would seek measures to keep its basket price within the price band \$22 to \$28 per barrel.

The price band mechanism aims at maintaining the oil price range by raising production by 500,000 barrels per day if the basket price stays above \$28 barrel per day for 20 consecutive trading days. OPEC could lower output by a similar amount if the price stayed below \$22 per barrel for 10 consecutive trading days.